

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

TAHUN 2024



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Jalan Pangeran Kornel Nomor 307 Tlp. /Fax. (0261) 2140667  
website : [diperta.sumedangkab.go.id](http://diperta.sumedangkab.go.id) ; e-mail :  
[dipertakabsumedang@gmail.com](mailto:dipertakabsumedang@gmail.com)  
SUMEDANG 45313

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2024. LKIP ini merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama masa satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKIP.

Adapun tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sumedang, 5 Januari 2025

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Sumedang



**H. SAJIDIN, S.Hut., M.T.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730330 199903 1 006

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Gambaran Umum .....	1
1.2 Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi.....	2
1.3. Struktur Organisasi .....	4
1.4. Isu-isu Strategis .....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>12</b>
2.1. Rencana Strategis .....	12
2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang .....	12
2.3 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	14
2.4 Indikator kinerja Penyelenggara Bidang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang .....	16
2.6 Survey Kepuasan Masyarakat .....	21
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>23</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	24
3.2 Realisasi Anggaran.....	34
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>38</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Gambaran Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2024 sebagai wujud Akuntabilitas Kinerja kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya dengan pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024, dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kepala Daerah. Di samping itu, LKIP ini juga dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang menuju terwujudnya *good governance*, wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Sumedang serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.

Secara kronologis penerapan SAKIP dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

- a) mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis untuk mencapai tujuan,

- b) menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang,
- c) menyusun Penetapan Kinerja,
- d) merumuskan Indikator Kinerja Unit Kerja dengan berpedoman kepada kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian pada upaya-upaya mengatasi permasalahan fundamental, isu-isu aktual dan antisipasi terhadap kendala yang mungkin timbul,
- e) memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi secara seksama,
- f) melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji kinerja aktual dengan rencana/ target yang ditetapkan dan membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, serta
- g) melakukan evaluasi secara keseluruhan.

Penerapan SAKIP tahun 2024 merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan dilaksanakan pada tahun pertama pelaksanaan pembangunan pertanian berdasarkan Renstra Periode 2024-2026 yang telah mengalami perubahan di tahun 2024. Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal sehingga dapat dijadikan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan pembaharuan birokrasi pemerintah untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan suatu komitmen yang kuat dari para pejabat dan semua pegawai jajaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang di dalam mengimplementasikan sistem ini dengan maksud untuk mengetahui seberapa jauh tingkat capaian kinerja, kendala/ hambatan dan permasalahan serta upaya pemecahannya dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang yang pada gilirannya dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 disusun sebagai acuan bagi unit kerja di bawahnya dalam menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang ini antara lain memuat visi, misi, analisis perkembangan strategik, tujuan dan sasaran, serta penjabaran program kerja setiap Bidang di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang setiap tahun dalam periode pembangunan Tahun 2024-2026.

## **1.2 Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi**

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17). Sedangkan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, yaitu menyelenggarakan:

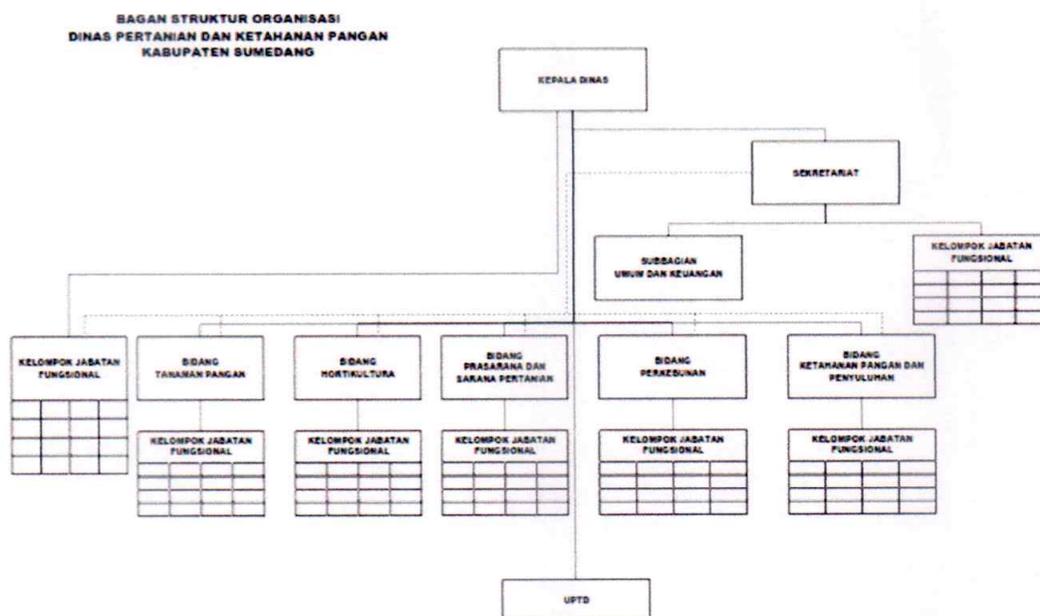
- a. Perumusan kebijakan bidang ketahanan pangan dan sebagian bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan dan sebagian bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan dan sebagian bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang ketahanan pangan dan sebagian bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan Bupati, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) Sekretariat Dinas, 5 (lima) Bidang, 30 (tiga puluh) UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional, secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretariat, membawahkan 2 (dua) Sub Bagian yaitu:
  - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Kepala Bidang Tanaman Pangan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
3. Kepala Bidang Hortikultura, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
4. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
5. Kepala Bidang Perkebunan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
6. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
7. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah (26 UPTD tersebar di 26 Kecamatan);
8. UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya
9. UPTD Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong
10. UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang
11. UPTD Agrobisnis Tembakau Sumedang;
12. Kelompok Jabatan Fungsional.

### 1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, maka pelaksanaan tugas pokok dilakukan oleh unit-unit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sesuai dengan Susunan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada gambar berikut ini :



### 1.4. Isu-isu Strategis

Pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2024. Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan dua aspek yakni :

- 1) Permasalahan dalam Urusan Pertanian;
- 2) Permasalahan dalam Urusan Pangan;

**Tabel 1.1  
Isu Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang**

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1	Pertanian	Kurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani.	1. Regenerasi Petani 2. Pasokan Pupuk dan Kenaikan Harga Pupuk 3. Kapasitas Penyuluh dan Jumlah Penyuluh
		Terbatasnya Alokasi Pupuk Bersubsidi.	
		Belum memadainya sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen.	
		Kurangnya kesadaran dan pengetahuan petani tentang cara penggunaan pupuk yang benar dan efektif serta penggunaan pupuk organik.	

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
		Terbatasnya jumlah penyuluh pertanian yang tersedia di lapangan, belum terpenuhinya 1 Desa 1 Penyuluh.	4. Literasi Sumberdaya Manusia Pertanian 5. Daya Tawar Petani 6. Kelembagaan Ekonomi Pertanian 7. Pengembangan Infrastruktur Pertanian
		Kurangnya kualitas dan kompetensi penyuluh pertanian.	
		Terbatasnya akses pendidikan formal dan non-formal untuk sumber daya manusia di sektor pertanian.	
		Terbatasnya akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi sumber daya manusia di sektor pertanian.	
		Terbatasnya akses petani ke pasar dan informasi harga.	
		Kurangnya akses petani terhadap informasi pasar, tren konsumen, dan persyaratan standar mutu produk yang berlaku.	
		Dominasi tengkulak dan perantara dalam sistem pemasaran.	
		Pengembangkan sistem kelembagaan yang belum memadai untuk memfasilitasi pengembangan korporasi pertanian, kelembagaan ekonomi petani dan asosiasi petani, sehingga petani dapat memperkuat daya tawar mereka dalam negosiasi dengan pihak lain.	
		Tidak adanya struktur lembaga yang memadai untuk memfasilitasi koordinasi antara petani, perusahaan, dan lembaga keuangan dalam rangka mengembangkan sistem ekonomi pertanian yang inklusif.	
		Belum terjalinnya hubungan antara petani, perusahaan, dan lembaga keuangan dalam rangka membangun sistem ekonomi pertanian yang inklusif dan berkelanjutan.	
Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola bisnis pertanian dan mengembangkan strategi pemasaran dan distribusi yang efektif.			
2	Pangan	Belum optimalnya akses dan distribusi pangan lokal Rendahnya kesadaran dan minat masyarakat untuk mengonsumsi pangan lokal Kemitraan dan kerjasama pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat Rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya makanan sehat dan bergizi Pengembangan sistem informasi dan pemantauan yang efektif untuk memastikan keamanan pangan di seluruh rantai pasokan.	1. Pemanfaatan Pangan Lokal 2. Lumbung Pangan Masyarakat 3. Keamanan Pangan

Sumber: DPKP, 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan bidang Pertanian dan bidang Ketahanan Pangan sebagai berikut:

### **1. Regenerasi Petani**

Isu strategis regenerasi petani telah menjadi perhatian utama di berbagai negara, termasuk Indonesia. Regenerasi petani merujuk pada upaya untuk menggantikan petani yang sudah tua atau keluar dari profesi pertanian dengan petani muda yang lebih produktif dan inovatif. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di masa depan.

Regenerasi petani sering mengalami kendala, seperti kurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani, kurangnya akses ke lahan pertanian, dan kurangnya modal untuk memulai usaha pertanian. Selain itu, kurangnya akses ke teknologi pertanian dan pelatihan juga dapat menjadi kendala dalam regenerasi petani.

Untuk mengatasi isu ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan berbagai upaya, seperti memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani muda, memberikan insentif kepada petani yang mau mempertahankan profesi mereka, serta memperkuat kemitraan antara petani dengan pihak swasta dan institusi pendidikan untuk meningkatkan inovasi dan daya saing petani.

### **2. Pasokan Pupuk dan Kenaikan Harga Pupuk**

Sumedang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi pertanian yang besar, dan pupuk menjadi faktor penting dalam meningkatkan produksi pertanian di daerah tersebut. Masalah pasokan pupuk di Sumedang terutama disebabkan oleh ketergantungan pada pasokan pupuk Anorganik bersubsidi. Ketergantungan ini dapat menyebabkan keterlambatan atau bahkan kekurangan pasokan pupuk di musim tanam tertentu. Selain itu, kenaikan harga pupuk juga dapat terjadi akibat fluktuasi harga bahan baku di pasar internasional dan perubahan kebijakan pemerintah.

Dalam mengatasi isu ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumedang melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan produksi pupuk organik dan mengembangkan sistem pertanian yang ramah lingkungan. Selain itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga memberikan edukasi kepada petani untuk mengoptimalkan penggunaan pupuk dan memanfaatkan teknologi pertanian yang lebih efisien.

### **3. Kapasitas Penyuluh dan Jumlah Penyuluh**

Penyuluh pertanian merupakan sumber daya manusia yang sangat penting dalam memfasilitasi transfer pengetahuan dan teknologi pertanian kepada petani dan pelaku usaha pertanian. Masalah kapasitas penyuluh dan jumlah penyuluh di Sumedang terutama disebabkan oleh kurangnya akses dan penggunaan teknologi dan informasi pertanian terbaru oleh penyuluh, kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi penyuluh, serta kurangnya jumlah penyuluh yang tersedia.

Rendahnya kapasitas penyuluh pertanian dapat menjadi kendala dalam pengembangan sektor pertanian di suatu wilayah. Kapasitas penyuluh pertanian mencakup kemampuan mereka dalam memberikan informasi dan bimbingan teknis yang tepat dan akurat kepada petani, serta keterampilan mereka dalam mengatasi permasalahan yang muncul dalam produksi pertanian.

Jika kapasitas penyuluh pertanian rendah, maka petani dapat kehilangan kepercayaan dan mengalami kesulitan dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertaniannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian melalui berbagai program dan kebijakan.

Jumlah penyuluh pertanian yang terbatas dapat menjadi kendala dalam pengembangan sektor pertanian. Penyuluh pertanian memegang peran penting dalam memberikan informasi dan bimbingan teknis kepada petani mengenai teknologi pertanian terbaru, praktik pengelolaan tanaman yang efektif, serta membantu mengatasi permasalahan yang muncul dalam produksi pertanian. Dengan demikian, keberadaan penyuluh pertanian yang cukup akan membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Dikarenakan keterbatasan Penyuluh Pertanian maka petani dapat kehilangan akses terhadap informasi dan bimbingan teknis yang mereka butuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertaniannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan jumlah penyuluh pertanian melalui berbagai program dan kebijakan.

#### **4. Literasi Sumberdaya Manusia Pertanian**

Literasi sumberdaya manusia pertanian merujuk pada pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh petani dan pelaku usaha pertanian dalam mengelola sumberdaya pertanian secara efektif dan berkelanjutan. Masalah literasi sumberdaya manusia pertanian di Sumedang terutama disebabkan oleh kurangnya akses dan penggunaan teknologi dan informasi pertanian terbaru, kurangnya pendidikan formal di bidang pertanian, serta kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi petani dan pelaku usaha pertanian.

Literasi sumber daya manusia pertanian sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor pertanian di suatu wilayah. Literasi sumber daya manusia pertanian mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mengembangkan dan mengelola sektor pertanian.

Dalam hal ini, penting bagi petani dan pelaku usaha pertanian untuk memiliki pengetahuan yang memadai tentang teknologi pertanian terbaru, praktik pengelolaan tanaman yang efektif, serta keterampilan dalam mengatasi permasalahan yang muncul dalam produksi pertanian. Selain itu, mereka juga perlu memiliki sikap yang positif dalam

mengembangkan dan mengelola sektor pertanian, seperti menghargai lingkungan, berkolaborasi dengan petani lain, dan mencari peluang bisnis yang berkelanjutan.

## **5. Daya Tawar Petani**

Daya tawar petani mengacu pada kemampuan petani untuk mempengaruhi harga produk pertanian dan memperoleh keuntungan yang adil dari penjualan hasil panen mereka. Di Sumedang, daya tawar petani masih relatif rendah karena beberapa faktor, seperti kurangnya akses informasi pasar yang memadai, ketidakmampuan petani dalam bernegosiasi dengan pembeli, kemitraan yang masih lemah, serta keterbatasan teknologi pertanian yang digunakan oleh petani.

Dalam mengatasi isu ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumedang bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petani dalam hal manajemen bisnis, pemasaran dan membangun kemitraan produk pertanian. Selain itu, mereka juga membantu petani untuk memperoleh akses informasi pasar yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta membantu memfasilitasi penjualan produk pertanian secara langsung kepada pembeli.

Selain itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumedang juga berupaya meningkatkan kualitas produk pertanian dan mempromosikannya secara aktif kepada konsumen di pasar lokal dan nasional. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi petani.

## **6. Kelembagaan Ekonomi Pertanian**

Kelembagaan ekonomi pertanian merupakan suatu sistem atau jaringan yang terdiri dari berbagai aktor atau pihak yang saling terkait dalam memproduksi, memasarkan, dan mengonsumsi produk pertanian. Kelembagaan ini mencakup segala hal yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan pemasaran produk pertanian, termasuk lembaga-lembaga yang terlibat dalam regulasi dan pengawasan sektor pertanian.

Salah satu kelembagaan ekonomi pertanian yang paling penting adalah kelompok tani atau petani yang bekerja sama dalam memproduksi dan memasarkan produk pertanian. Kelompok tani ini dapat membantu meningkatkan daya saing petani dan memperkuat negosiasi dalam memasarkan produknya. Selain itu, terdapat juga lembaga pengolahan seperti pabrik pengolahan hasil pertanian yang membantu petani dalam mengubah hasil pertanian menjadi produk yang siap dijual ke pasar.

Selain kelompok tani dan pabrik pengolahan, ada juga lembaga pemasaran seperti pasar tradisional atau modern dan distributor yang membantu menghubungkan antara produsen dan konsumen. Selain itu, kelembagaan ekonomi pertanian juga mencakup lembaga-lembaga pendanaan seperti bank atau lembaga kredit yang memberikan bantuan modal bagi petani.

Di tingkat nasional, kelembagaan ekonomi pertanian juga meliputi lembaga-lembaga pemerintah seperti Kementerian Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan sektor pertanian secara keseluruhan. Dalam rangka memperkuat kelembagaan ekonomi pertanian, diperlukan koordinasi dan sinergi antara semua pihak yang terlibat untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan daya saing sektor pertanian secara keseluruhan.

#### **7. Pengembangan Infrastruktur Pertanian**

Pengembangan infrastruktur pertanian di Kabupaten Sumedang menjadi isu strategis yang perlu ditangani dengan serius. Kabupaten Sumedang memiliki potensi pertanian yang besar, namun masih banyak kendala yang menghambat pertumbuhan sektor pertanian, seperti jaringan irigasi yang tidak memadai, akses transportasi usahatani yang kurang, serta kurangnya alat dan mesin pertanian modern. Oleh karena itu, perlu mengambil tindakan untuk meningkatkan infrastruktur pertanian, salah satunya dengan membangun atau memperbaiki jaringan irigasi tersier, memperbaiki jalan-jalan usaha pertanian yang rusak, dan menyediakan alat dan mesin pertanian modern kepada petani. Selain itu, pembangunan sarana prasarana sistem pemasaran modern dan pelatihan bagi petani juga menjadi hal yang penting untuk membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian di daerah tersebut. Dengan strategi pengembangan infrastruktur pertanian yang tepat, diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumedang.

#### **8. Pemanfaatan Pangan Lokal**

Pemanfaatan pangan lokal merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kedaulatan pangan. Pangan lokal memiliki keunggulan dalam hal ketersediaan, keanekaragaman, dan keterhubungan dengan budaya lokal. Dengan memanfaatkan pangan lokal, masyarakat dapat mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Namun, dalam praktiknya, pemanfaatan pangan lokal masih mengalami kendala, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan lokal, keterbatasan pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk mengolah komoditas pangan lokal, kurangnya infrastruktur untuk pengolahan dan distribusi pangan lokal, serta kurangnya akses ke pasar yang luas untuk memasarkan produk lokal.

#### **9. Lumbung Pangan Masyarakat**

Lumbung pangan masyarakat adalah sebuah konsep yang menekankan pentingnya menjaga stok pangan yang cukup dalam suatu wilayah, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka saat terjadi kekurangan pasokan pangan. Konsep ini dilandasi oleh prinsip kedaulatan pangan, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam memproduksi dan mengelola pangan di wilayah mereka.

Dalam praktiknya, lumbung pangan masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai upaya, seperti membangun gudang penyimpanan pangan yang memadai, menjalin kemitraan dengan petani lokal untuk meningkatkan produksi pangan, dan membentuk jaringan distribusi pangan yang efektif. Selain itu, masyarakat juga dapat dilibatkan secara aktif dalam mengelola lumbung pangan, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, hingga distribusi pangan.

Pemerintah juga dapat berperan dalam mendukung konsep lumbung pangan masyarakat ini dengan memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan infrastruktur, fasilitas, dan akses ke pasar, serta memfasilitasi program-program pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola lumbung pangan.

Selain itu, swasta juga dapat memberikan dukungan dalam bentuk investasi dan teknologi untuk meningkatkan produksi dan distribusi pangan, serta membentuk kemitraan dengan petani lokal untuk meningkatkan nilai tambah produk pangan.

Dengan menjaga stok pangan yang cukup melalui konsep lumbung pangan masyarakat, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka dengan lebih terjamin dan dapat mengurangi ketergantungan pada pangan impor. Selain itu, konsep ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut melalui peningkatan produksi dan nilai tambah produk pangan lokal.

## **10. Keamanan Pangan**

Keamanan pangan adalah sebuah konsep yang menekankan pentingnya memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat aman dan bebas dari risiko kesehatan yang membahayakan. Konsep ini meliputi berbagai aspek, seperti ketersediaan pangan yang cukup, kualitas pangan yang baik, keamanan pangan dari bahan berbahaya, serta ketersediaan informasi tentang pangan yang dikonsumsi.

Untuk mencapai keamanan pangan yang optimal, perlu dilakukan berbagai upaya, seperti peningkatan produksi dan distribusi pangan yang terkendali, penerapan sistem pengawasan dan pengendalian mutu pangan, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih dan mengonsumsi pangan yang aman dan sehat.

Pemerintah juga berperan penting dalam mencapai keamanan pangan, dengan memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan dan regulasi terkait produksi dan distribusi pangan, serta memastikan adanya sistem pengawasan dan pengendalian mutu pangan yang efektif. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan bimbingan bagi masyarakat dan pelaku usaha pangan dalam mengelola pangan dengan aman dan sehat.

Dengan mencapai keamanan pangan yang optimal, diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri pangan yang lebih berkualitas dan aman.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan LKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2024 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan realisasi tahun ini dengan tahun yang lalu
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisa penyebab peningkatan/ penurunan kinerja beserta solusi yang dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
7. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan mengemukakan permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan produk dari perencanaan strategis, yaitu suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

### 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang ditempuh menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPD Kabupaten Sumedang, kebijakan pembangunan jangka menengah provinsi, nasional dan isu-isu strategis pembangunan pertanian.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang terkait dengan Misi Kedua dan Keempat RPD. Misi kedua yaitu Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri dan Misi Keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada Misi Kedua terdapat Tujuan yang terkait, yaitu Tujuan Pertama yaitu Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dengan Sasaran Meningkatnya Pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan. Tujuan Kedua yaitu Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat dengan Sasaran Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan. Pada Misi Keempat terdapat Tujuan yang terkait, yaitu Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif dengan Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah.

Untuk mendukung Misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan RPD Tahun 2024-2026 tersebut maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menetapkan Tujuan Rencana Strategis Periode 2024-2026, yaitu:

- 1. Meningkatnya pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan;**
- 2. Meningkatnya Ketahanan Pangan menuju kemandirian pangan;**
- 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah.**

Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian dan Menjamin Ketersediaan Pangan Utama sebagai salah bentuk untuk mewujudkan percepatan Pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan dan Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan di Kabupaten Sumedang. Ketahanan pangan didukung oleh beberapa sub sektor pertanian antara

lain tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Ketersediaan pangan diawali dengan hasil produksi pertanian yang melimpah dan mencukupi baik kualitas maupun kuantitas. Pergerakan perkembangan produksi pertanian akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan berdaya saing. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran Renstra selain menerjemahkan tujuan dari RPD, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJMD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah pertanian dan ketahanan pangan merupakan sarana untuk melaksanakan sekaligus upaya mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang telah menetapkan sasaran yaitu :

1. ***Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian;***
2. ***Menjamin Ketersediaan Pangan Utama;***
3. ***Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah.***

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Periode 2024-2026 disajikan pada Tabel 2.1

**TABEL 2.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PERIODE 2024 – 2026**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan		Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,28-4,94 Persen	3,48-5,15 Persen	3,69-5,35 Persen
		Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Presentase Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian	1,49 Persen	1,99 Persen	2,48 Persen
2	Meningkatnya Ketahanan Pangan menuju kemandirian pangan		Nilai komposit FSVa	64,71 Poin	67,21 Poin	69,71 Poin

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Menjamin Ketersediaan Pangan Utama	Skor Pola Pangan Harapan	94,5 Skor	94,7 Skor	95,0 Skor
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah		Nilai LPPD Kabupaten	3,76 Nilai	3,78 Nilai	3,80 Nilai
		Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah	82 Nilai	84 Nilai	90 Nilai

Sumber: DPKP, 2024

### 2.3 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, maka diperlukan suatu strategi pembangunan serta kebijakan pembangunan yang akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2024-2026. Visi pemerintah daerah pada tahun 2024 - 2026 yang hendak dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yaitu : “SEJAHTERA, AGAMIS DAN DEMOKRATIS”. Misi Pemerintah Daerah Sumedang dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Sumedang ditetapkan 5 (lima) misi Pemerintah Daerah Sumedang, misi yang terkait dengan program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang yaitu Misi kedua: Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri dan Misi keempat: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, antara lain: memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu, membantu menghubungkan tiap-tiap

strategi kepada sasaran secara lebih rasional; dan mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan permasalahan serta isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab III, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan dalam Bab IV, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun 2024-2026, dapat dijabarkan sebagai berikut.

**TABEL 2.2**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMEDANG**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan agroteknologi;</li> <li>2. Peningkatan kualitas tanah;</li> <li>3. Mengembangkan sistem pertanian terpadu;</li> <li>4. Pembangunan infrastruktur pendukung;</li> <li>5. Penguatan kemitraan petani;</li> <li>6. Optimalisasi sumberdaya manusia penyuluh pertanian dan revitalisasi mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian;</li> <li>7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan Kelembagaan Petani;</li> <li>8. Peningkatan akses pasar;</li> <li>9. Pengembangan agrowisata.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kolaborasi antara sektor pertanian dan lembaga pendidikan dan penelitian;</li> <li>2. Pembangunan dan pengembangan Klaster pertanian;</li> <li>3. Hilirisasi produk pertanian;</li> <li>4. Meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi penyuluh dan petani mengenai teknologi pertanian modern yang efektif secara berkelanjutan;</li> <li>5. Pengembangan sistem informasi pertanian;</li> <li>6. Pembangunan Infrastruktur Pertanian.</li> </ol>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Ketahanan Pangan menuju kemandirian pangan	Menjamin Ketersediaan Pangan Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan ketersediaan pangan dan stabilisasi harga;</li> <li>2. Peningkatan keamanan pangan;</li> <li>3. Pencegahan dan penanganan Daerah rawan pangan;</li> <li>4. Penguatan kelembagaan ketahanan pangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penganekaragaman konsumsi pangan;</li> <li>2. Akses masyarakat terhadap pangan berkualitas;</li> <li>3. Keamanan pangan segar asal tumbuhan;</li> <li>4. Kelembagaan dewan keamanan pangan;</li> <li>5. Peningkatan diversifikasi dan keamanan pangan;</li> <li>6. Peningkatan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;</li> <li>7. Koordinasi sektor produksi dengan pasar pengguna;</li> <li>8. Peningkatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;</li> <li>9. Peningkatan penanggulangan daerah rentan pangan;</li> <li>10. Pengembangan sistem informasi Ketahanan Pangan.</li> </ol>
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan dan Pengembangan SDM;</li> <li>2. Peningkatan Jumlah SDM;</li> <li>3. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi;</li> <li>4. Pengembangan Jaringan Kerja;</li> <li>5. Peningkatan Manajemen Sumber Daya;</li> <li>6. Pengembangan Riset dan Inovasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM yang berkelanjutan;</li> <li>2. Rekrutmen Pegawai Baru berkualitas dan berkompeten;</li> <li>3. Peningkatan kemitraan kerja.</li> </ol>

Sumber: DPKP, 2024

#### 2.4 Indikator kinerja Penyelenggara Bidang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

**TABEL 2.4**  
**INDIKATOR BIDANG URUSAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran/Formulasi	2024	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian	Hasil Penjumlahan dari Produksi Komoditas Pertanian setiap kecamatan	935.276	Ton
	KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Luas Panen Komoditas Pertanian	Hasil Penjumlahan dari Luas panen Komoditas Pertanian	114.155	Ha
	KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	Persentase Peningkatan Produksi Benih Komoditas Pertanian	((Jumlah Produksi Benih/Bibit Komoditas Pertanian Tahun (n) – Jumlah Produksi Benih/Bibit Komoditas Pertanian Tahun sebelumnya (n-1)) / Jumlah Produksi Benih Komoditas Pertanian Tahun sebelumnya (n-1)) * 100	21,39	Persen
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan IP	(Jumlah Luas Tanam Tahun (n) / Jumlah Luas Baku Lahan Tahun (n)) *100	2,47	Kali/ Tahun
	KEGIATAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian	Dokumen yang tersusun dari laporan setiap sub kegiatan	4	Dokumen
	KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Prasarana pertanian yang dibangun/ direhabilitasi	Jumlah Prasarana pertanian yang dibangun/ direhabilitasi Tahun (n) + Jumlah total Prasarana pertanian yang dibangun/ direhabilitasi Tahun sebelumnya	63	Unit
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian	(Jumlah Luas areal yang di kendalikan / (95%*Jumlah luas tanam)) *100	14,33	persen
	KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian	Jumlah luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian	5.938	Ha
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani	(Jumlah kelompok tani yang dibina Tahun (n) / Jumlah kelompok tani yang terdaftar di SIMLUHTAN) *100	40,29	Persen
	KEGIATAN PELAKSANAAN	Jumlah Pelaksanaan	Jumlah Laporan Penilaian Kelas Kelompok Tani dan Laporan Pelaksanaan	2	Laporan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran/Formulasi	2024	
	PENYULUHAN PERTANIAN	Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan Tingkat Kabupaten		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan pangan Pokok	Jumlah ketersediaan pangan pokok / jumlah penduduk	257,28	kg/ kapita/ tahun
	KEGIATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk peningkatan Pengembangan Pengelolaan Cadangan Pangan	Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya yang dibangun/ direhabilitasi	6	Unit
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Lokal Non Beras Non Terigu	Menggunakan analisis harmonisasi PPH	22,12	Kg/ Kapita/ Tahun
	KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	Jumlah Dokumen penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Dokumen yang tersusun dari laporan setiap sub kegiatan	1	Dokumen
	KEGIATAN PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	Jumlah Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Dokumen yang tersusun dari laporan setiap sub kegiatan	1	Dokumen
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Tertanganinya Daerah	(Jumlah kejadian kerawaan pangan yang di Intervensi/ Jumlah kejadian kerawaan pangan) *100	100	Persen

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran/Formulasi	2024	
		kerawanan pangan			
	KEGIATAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah Penanganan daerah rawan pangan	Dokumen yang tersusun dari laporan setiap sub kegiatan	1	Dokumen
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Jumlah Nomor Register PSAT-PDUK yang diterbitkan	70	Nomor Register
	KEGIATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan Pengawasan keamanan pangan segar	Dokumen yang tersusun dari laporan setiap sub kegiatan	4	Dokumen
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Lembar Kerja Evaluasi SAKIP	A	Kategori
	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Laporan yang tersusun dari setiap sub kegiatan	7	Laporan
	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan setiap sub kegiatan setiap triwulan	4	Laporan
	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Laporan setiap sub kegiatan setiap triwulan	4	Laporan
	KEGIATAN ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan	Laporan akhir dari kegiatan	1	Laporan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran/Formulasi	2024	
	KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			
	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan setiap sub kegiatan	5	Laporan
	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Akuntabel	Laporan setiap sub kegiatan	9	Laporan
	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Laporan setiap sub kegiatan setiap triwulan	4	Unit
	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAEAH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan setiap sub kegiatan setiap semester	2	Laporan
	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan setiap sub kegiatan	5	Laporan

## 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Untuk mengetahui perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.5**  
**Target Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2026
1	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Presentase Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian	Persen	1,49	2,48
2	Menjamin Ketersediaan Pangan Utama	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	94,5	95,0
3	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	82	90

## 2.6 Survey Kepuasan Masyarakat

Pada dasarnya pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik sudah ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) disusun dengan tujuan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya, sedangkan bagi masyarakat Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan.

Survey kepuasan masyarakat ini tersebar di wilayah Kabupaten Sumedang dikoordinir di UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan tiap wilayah kecamatan. Selain itu juga dilaksanakan di

tingkat Kabupaten yaitu di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang. Pelaksanaan Survey kepuasan masyarakat diadakan satu kali dalam masa satu tahun untuk Tahun 2024 ini. Hasil survey direkap dan dianalisa di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, Jl. Pangeran Kornel No. 307 Sumedang.

Responden dalam survey kali ini adalah pengguna layanan dari UPTD maupun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang terdiri dari masyarakat umum maupun para petani yang tergabung dalam kelompok tani di wilayah Kabupaten Sumedang. Adapun jumlah responden yang di sampel adalah sebanyak **330** orang. Untuk mengukur kualitas pelayanan digunakan tabel nilai sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60- 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644-3,523	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,524 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

#### **Hasil Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat**

Berdasarkan isian responden pada kuesioner survey kepuasan masyarakat, maka dapat diperoleh jumlah nilai persepsi Unsur Pelayanan. Jumlah tersebut merupakan hasil penjumlahan nilai persepsi pada masing-masing unsur pelayanan dari semua responden yang memberikan jawaban melalui kuesioner. Adapun jumlah nilai per unsur pelayanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang. Sehingga mencerminkan bahwa waktu pelayanan memerlukan perhatian dalam melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Dari hasil perhitungan didapat Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mencapai **81,74** apabila dikonversi ke tabel konversi survey maka akan mendapatkan mutu belayanan B dengan kinerja Baik.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih serta persentase realisasi anggaran lebih rendah dari capaian kinerja. Penghitungannya dengan cara pengurangan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran.

Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2026
1	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Presentase Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian	Persen	1,49	2,48
2	Menjamin Ketersediaan Pangan Utama	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	94,5	95,0
3	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	82	90

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja, 2024.

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

#### 1. Presentase Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian

Persentase peningkatan produksi komoditas pertanian dihitung berdasarkan selisih antara produksi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibagi dengan produksi tahun sebelumnya, kemudian dikalikan 100%. Komoditas pertanian yang dimaksud meliputi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan Kabupaten Sumedang



telah meningkatkan produksi komoditas pertanian. Hal ini ditandai dengan capaian Presentase Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Sumedang pada tahun 2024 sangat baik dengan

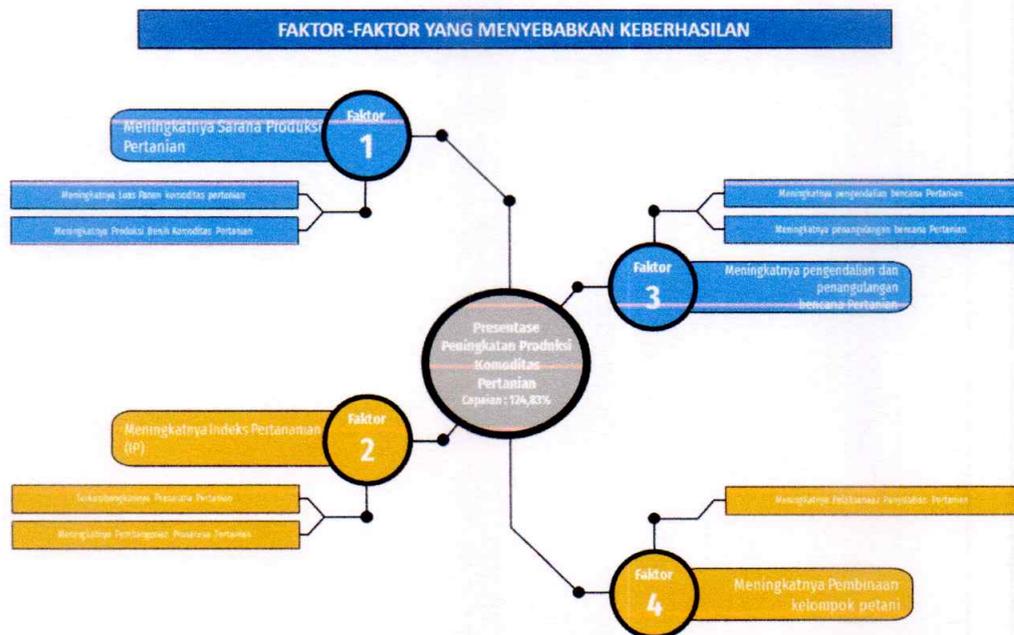
capaian kinerja 124,83% dari target sebesar 1,49% dan terealisasi 1,86%. Keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai inovasi dan kebijakan strategis yang diterapkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang. Penggunaan teknologi dan alat pertanian yang lebih efisien telah membantu meningkatkan produktivitas. Selain itu Dinas secara aktif memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam budidaya tanaman, penggunaan pupuk, serta pengendalian hama dan penyakit. Reabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan dan rehabilitasi jalan usaha pertanian, penyediaan benih unggul, serta distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran turut berkontribusi dalam meningkatkan produksi pertanian.

Dari segi realisasi, Presentase peningkatan produksi komoditas pertanian menurun 0,37% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 2,26% dan tahun 2024 sebesar 1,86%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Presentase peningkatan produksi komoditas pertanian menurun sebesar 65,38% dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 190,21% dan pada tahun 2024 sebesar 124,83%. Penjelasan perbedaan realisasi dengan target tahun sebelumnya disebabkan oleh penggunaan rumus indikator berupa 
$$\left( \frac{\text{Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Tahun } (n) - \text{Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Tahun Sebelumnya } (n-1)}{\text{Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Tahun Sebelumnya } (n-1)} \right) * 100$$
 sehingga capaian produksi tahun sebelumnya menjadi pembagi dalam rumus.

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Presentase peningkatan produksi komoditas pertanian Kabupaten Sumedang tahun 2024 belum melebihi target akhir RPJMD yaitu sebesar 75,00% dari target akhir RENSTRA sebesar 2,48% dan terealisasi 1,86% pada tahun 2024.

Pada tingkat nasional, Presentase peningkatan produksi komoditas pertanian Kabupaten Sumedang tahun 2024 tidak dapat dibandingkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Presentase Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian di Sumedang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Berdasarkan gambar di atas, Presentase Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian di Sumedang dipengaruhi oleh Meningkatnya Sarana Produksi Pertanian. Sarana Produksi Pertanian sudah meningkat yang diperlihatkan dari Peningkatan Sarana Produksi Komoditas Pertanian sebanyak 3 Komoditas. Peningkatan Sarana Produksi Komoditas Pertanian dipengaruhi oleh Meningkatnya Luas Panen komoditas pertanian dan Meningkatnya Produksi Benih Komoditas Pertanian. Luas Panen komoditas pertanian sudah meningkat terlihat dari Presentase Peningkatan Luas Panen Komoditas Pertanian sebesar 1,49 % dan Produksi Benih Komoditas Pertanian sudah meningkat terlihat dari Presentase Peningkatan Produksi Benih Komoditas Pertanian sebesar 3,75 %.

Presentase Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian di Sumedang dipengaruhi juga oleh Meningkatnya Indeks Pertanaman (IP). Indeks Pertanaman (IP) sudah meningkat yang diperlihatkan dari Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) sebesar 2,91 Kali/ Tahun. Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dipengaruhi oleh Berkembangkannya Prasarana Pertanian dan Meningkatnya Pembangunan Prasarana Pertanian. Berkembangkannya Prasarana Pertanian sudah meningkat yang diperlihatkan dari Presentase Prasarana Pertanian yang Dikembangkan sebesar 100% dan Pembangunan Prasarana Pertanian sudah meningkat yang diperlihatkan dari Presentase Prasarana Pertanian yang Dibangun/Direhabilitasi sebesar 15,04 %.

Presentase Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian di Sumedang dipengaruhi juga oleh Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian. Pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian sudah meningkat yang diperlihatkan dari Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian sebesar 95,68 %. Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian dipengaruhi oleh Meningkatnya pengendalian bencana Pertanian dan Meningkatnya penanggulangan bencana Pertanian. pengendalian bencana Pertanian sudah meningkat yang diperlihatkan dari Presentase

Pengendalian Bencana Pertanian sebesar 75,64% dan penanggulangan bencana Pertanian sudah meningkat yang diperlihatkan dari Persentase Penanggulangan Bencana Pertanian sebesar 100%.

Terakhir, Presentase Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian di Sumedang dipengaruhi oleh Meningkatnya Pembinaan kelompok petani. Pembinaan kelompok petani sudah meningkat yang diperlihatkan dari Cakupan bina kelompok petani sebesar 36,92 %. Pembinaan kelompok petani dipengaruhi oleh Meningkatnya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian sudah meningkat yang diperlihatkan dari Persentase Peningkatan Skor Kelas Kelompok Tani sebesar 24,61.%

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Presentase Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Berdasarkan gambar di atas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Presentase Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian meliputi

1. Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih.
2. Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan.
3. Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura.
4. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan.
5. Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani.

Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian di Sumedang didukung oleh 4 program diantaranya adalah Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian. Efisiensi anggaran capaian strategis di atas sebesar 3,61% atau setara Rp. 923.195.898,00. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 25.564.772.669,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.641.576.771,00 atau 96,39%.

## 2. Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan ukuran diversifikasi konsumsi pangan masyarakat yang mencerminkan keseimbangan konsumsi berbagai kelompok pangan. Skor ini dihitung berdasarkan perbandingan konsumsi energi dari masing-

masing kelompok pangan terhadap total konsumsi energi yang dianjurkan. Kabupaten Sumedang telah meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan. Hal ini ditandai dengan capaian Skor Pola Pangan Harapan di Sumedang pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 100% dari target sebesar 94,5 Skor dan terealisasi 94,5 Skor. Pola Pangan Harapan merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas konsumsi pangan masyarakat berdasarkan keseimbangan antara sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Keberhasilan Sumedang dalam mencapai target ini tidak lepas dari berbagai kebijakan dan program strategis yang telah dijalankan, antara lain: Pemerintah gencar mendorong konsumsi pangan lokal berbasis sumber daya alam setempat, masyarakat didorong untuk menanam berbagai jenis sayuran, buah, dan tanaman pangan lainnya di pekarangan rumah guna meningkatkan ketersediaan pangan bergizi secara mandiri, Kampanye edukasi mengenai pentingnya pola makan sehat (B2SA) terus digalakkan melalui program penyuluhan serta kerja sama dengan kader posyandu dan kelompok wanita tani (KWT) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan yang seimbang dan bergizi. Selain itu pemerintah kabupaten Sumedang juga melakukan investasi pada pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah dalam rangka Membangun ketahanan pangan yang memenuhi aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan.

Dari segi realisasi, Skor pola pangan harapan ada kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 93,9 Skor dan tahun 2024 sebesar 94,5 Skor. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Skor pola pangan harapan meningkat sebesar 0,29% dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 99,71% dan pada tahun 2024 sebesar 100%.

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Skor pola pangan harapan di Sumedang tahun 2024 belum melebihi target akhir RPJMD yaitu sebesar 99,47% dari target akhir RENSTRA sebesar 95 Skor dan terealisasi 94,5 Skor pada tahun 2024.

Pada tingkat nasional, Skor pola pangan harapan Sumedang tahun 2024 berada di atas rata rata nasional dengan selisih 0,4 poin dari rata rata nasional sebesar 94,1 Skor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Presentase Peningkatan Produksi



Komoditas Pertanian di Sumedang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Berdasarkan gambar di atas, Skor pola pangan harapan Sumedang dipengaruhi oleh Meningkatnya ketersediaan pangan untuk masyarakat dengan ketersediaan pangan pokok sebesar 240,45 kg/kapita/tahun. Ketersediaan pangan untuk masyarakat didukung oleh meningkatnya penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi Persentase ketersediaan infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk peningkatan Pengembangan Pengelolaan Cadangan Pangan sebesar 55,96%.

Skor pola pangan harapan Sumedang dipengaruhi juga oleh Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Lokal Non Beras Non Terigu. Pola Konsumsi Pangan Lokal Non Beras Non Terigu sudah meningkat yang diperlihatkan dari Peningkatan pola konsumsi pangan lokal non beras non terigu sebesar 20,1 Kg/ Kapita/ Tahun. Peningkatan pola konsumsi pangan lokal non beras non terigu dipengaruhi oleh Meningkatnya Distribusi Pangan Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dan Meningkatnya Pelaksanaan pola konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman). Distribusi Pangan Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan sudah meningkat yang diperlihatkan dari Persentase Peningkatan Distribusi Pangan Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sebesar 30,77% dan Pelaksanaan pola konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) sudah meningkat yang diperlihatkan dari Persentase Peningkatan Pelaksanaan Pola Konsumsi Pangan B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) sebesar 19,86 %.

Skor pola pangan harapan Sumedang dipengaruhi juga oleh Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan Daerah. Penanganan Kerawanan Pangan Daerah sudah meningkat yang diperlihatkan dari Persentase Kerawanan Pangan Daerah yang Tertangani sebesar 100%. Penanganan Kerawanan Pangan Daerah dipengaruhi oleh Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota sudah meningkat yang diperlihatkan dari Persentase Daerah

Rawan Pangan yang Diintervensi sebesar 100%.

Terakhir, Skor pola pangan harapan Sumedang dipengaruhi oleh Meningkatnya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Teregistrasi. Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sudah meningkat yang diperlihatkan dari Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Teregistrasi sebesar 81,12 %. Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Teregistrasi dipengaruhi oleh Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota. Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota sudah meningkat yang diperlihatkan dari Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan sebesar 100%.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Skor pola pangan harapan tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Berdasarkan gambar di atas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Skor pola pangan harapan meliputi:

1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
2. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
3. Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
4. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
5. Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota

Menjamin Ketersediaan Pangan Utama di Sumedang didukung oleh 4 program diantaranya adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, dan Program Pengawasan Keamanan Pangan. Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 7,89% atau setara Rp. 229.535.068,00. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.910.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.680.464.932,00 atau 92,11%.

### 3. Zona Integritas Perangkat Daerah

Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang memiliki komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini ditandai dengan capaian Zona Integritas Perangkat Daerah di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun 2024 sangat baik



dengan capaian kinerja 100% dari target sebesar 82 Nilai dan terealisasi 82,3 Nilai. Hasil penilaian Zona Integritas sebesar 82,3 menunjukkan progres positif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Untuk mencapai skor yang lebih tinggi di masa mendatang, perlu dilakukan peningkatan dalam efisiensi pelayanan, optimalisasi sistem pengaduan, serta penguatan budaya integritas

Dari segi realisasi, Zona integritas perangkat daerah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 57,2 Nilai dan tahun 2024 sebesar 82,3 Nilai. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Skor pola pangan harapan meningkat sebesar 28,87% dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 71,50% dan pada tahun 2024 sebesar 100,37%.

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Zona integritas perangkat daerah tahun 2024 belum melebihi target akhir RPJMD yaitu sebesar 91,11% dari target akhir RENSTRA sebesar 90 Nilai dan terealisasi 82,3 Nilai pada tahun 2024.

Pada tingkat nasional, Zona integritas perangkat daerah tahun 2024 tidak dapat dibandingkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Zona integritas perangkat daerah di Sumedang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Berdasarkan gambar di atas, Zona integritas perangkat daerah dipengaruhi oleh Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar A Kategori. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan realisasi A Kategori.

Nilai SAKIP Perangkat Daerah dipengaruhi oleh Berkualitasnya Laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas. Laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja telah berkualitas yang diperlihatkan dari Persentase penyelesaian laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas sebesar 100%.

Nilai SAKIP Perangkat Daerah dipengaruhi oleh Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah. laporan administrasi keuangan telah terselesaikan yang diperlihatkan dari Persentase penyelesaian laporan administrasi keuangan perangkat daerah sebesar 100%.

Nilai SAKIP Perangkat Daerah dipengaruhi oleh Terselesaikannya laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah. laporan administrasi barang milik daerah telah terselesaikan yang diperlihatkan dari Persentase penyelesaian laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah sebesar 100%.

Nilai SAKIP Perangkat Daerah dipengaruhi oleh Terselesaikannya laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah. laporan administrasi kepegawaian telah terselesaikan yang diperlihatkan dari Persentase penyelesaian laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah sebesar 100%.

Nilai SAKIP Perangkat Daerah dipengaruhi oleh Terselesaikannya laporan administrasi umum perangkat daerah. laporan administrasi umum telah terselesaikan yang diperlihatkan dari Persentase penyelesaian laporan administrasi umum perangkat daerah sebesar 100%.

Nilai SAKIP Perangkat Daerah dipengaruhi oleh Terselesaikannya laporan pengadaan

barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah. laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah telah terselesaikan yang diperlihatkan dari Persentase penyelesaian laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100%.

Nilai SAKIP Perangkat Daerah dipengaruhi oleh Terselesaikannya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan telah terselesaikan yang diperlihatkan dari Persentase penyelesaian laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%.

Nilai SAKIP Perangkat Daerah dipengaruhi oleh Terselesaikannya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan telah terselesaikan yang diperlihatkan dari Persentase penyelesaian laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Zona integritas perangkat daerah tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Berdasarkan gambar di atas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Skor pola pangan harapan meliputi:

1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.
2. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Zona integritas perangkat daerah didukung oleh 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 1,54% atau setara Rp. 52.7469.626,00. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 34.150.309.216,00 dan terealisasi sebesar Rp. 33.622.839.590,00 atau 98,46%.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 95,95%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi	
		Keuangan	
		Rp	%
		REALISASI	% REALISASI
<b>BELANJA</b>	<b>28,474,772,669</b>	<b>27,322,041,703</b>	<b>95.95</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	<b>2,910,000,000</b>	<b>2,680,464,932</b>	<b>92.11</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	<b>440,493,600</b>	<b>417,569,600</b>	<b>94.80</b>
<b>PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>440,493,600</b>	<b>417,569,600</b>	<b>94.80</b>
<i>PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN LAINNYA</i>	139,493,600	123,263,600	88.37
<i>PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA</i>	301,000,000	294,306,000	97.78
<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>654,000,000</b>	<b>589,124,400</b>	<b>90.08</b>
<b>PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN</b>	<b>434,000,000</b>	<b>386,414,400</b>	<b>89.04</b>
<i>PENYEDIAAN INFORMASI HARGA PANGAN TINGKAT PRODUSEN DAN KONSUMEN WILAYAH KABUPATEN/KOTA</i>	50,000,000	28,820,000	57.64
<i>KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN STOK, PASOKAN DAN HARGA PANGAN POKOK STRATEGIS</i>	358,000,000	347,220,000	96.99
<i>PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN NBM</i>	26,000,000	10,374,400	
<b>PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI</b>	<b>220,000,000</b>	<b>202,710,000</b>	<b>92.14</b>
<i>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL</i>	220,000,000	202,710,000	92.14
<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>1,690,506,400</b>	<b>1,559,642,780</b>	<b>92.26</b>
<b>PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1,690,506,400</b>	<b>1,559,642,780</b>	<b>92.26</b>
<i>PELAKSANAAN PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PADA KERAWANAN PANGAN YANG MENCAKUP DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>	1,690,506,400	1,559,642,780	92.26
<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>125,000,000</b>	<b>114,128,152</b>	<b>91.30</b>
<b>PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>125,000,000</b>	<b>114,128,152</b>	<b>91.30</b>

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi	
		Keuangan	
		Rp	%
		REALISASI	% REALISASI
REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30,000,000	26,500,000	88.33
PENYEDIAAN SARANA PENGUJIAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	70,000,000	64,067,350	91.52
PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGAWAS KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN	25,000,000	23,560,802	94.24
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>25,564,772,669</b>	<b>24,641,576,771</b>	<b>96.39</b>
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>9,564,162,280</b>	<b>9,008,742,762</b>	<b>94.19</b>
<b>PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>7,768,624,100</b>	<b>7,244,835,082</b>	<b>93.26</b>
PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI	5,548,508,000	5,078,668,682	91.53
PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN	2,220,116,100	2,166,166,400	97.57
<b>PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1,795,538,180</b>	<b>1,763,907,680</b>	<b>98.24</b>
PEMANFAATAN SDG HEWAN/TANAMAN	129,400,000	123,720,000	95.61
PENJAMINAN KEMURNIAN DAN KELESTARIAN SDG TANAMAN	1,666,138,180	1,640,187,680	98.44
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>14,385,548,467</b>	<b>14,246,225,587</b>	<b>99.03</b>
<b>PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>154,960,000</b>	<b>131,910,000</b>	<b>85.13</b>
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA	154,960,000	131,910,000	85.13
<b>PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>14,230,588,467</b>	<b>14,114,315,587</b>	<b>99.18</b>
PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI	2,863,298,000	2,848,359,343	99.48
PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA	5,498,815,700	5,432,551,968	98.79
REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI	5,868,474,767	5,833,404,276	99.40
<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>249,000,900</b>	<b>209,319,600</b>	<b>84.06</b>
<b>PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA</b>	<b>249,000,900</b>	<b>209,319,600</b>	<b>84.06</b>
PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	249,000,900	209,319,600	84.06
<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>1,366,061,022</b>	<b>1,177,288,822</b>	<b>86.18</b>
<b>PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>1,366,061,022</b>	<b>1,177,288,822</b>	<b>86.18</b>

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi	
		Keuangan	
		Rp	%
		REALISASI	% REALISASI
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA	606,587,000	541,732,300	89.31
PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA	589,234,022	477,316,522	81.01
PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	170,240,000	158,240,000	92.95

Tabel 3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Input			Output / Kinerja			Efisiensi (%)	Ket.
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8) - (5)	(10)
Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.564.162.280	9.008.742.762	94,19	935.276	948.685	101	6,81	Efisien
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	14.385.548.467	14.246.225.587	99,03	2,47	2,47	100	0,97	Efisien
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	249.000.900	209.319.600	84,06	14,33	14,33	100	15,94	Efisien
	Program Penyuluhan Pertanian	1.366.061.022	1.177.288.822	86,18	40,29	38,64	96	9,82	-
Menjamin Ketersediaan Pangan Utama	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	440.493.600	417.569.600	94,80	257,28	322,89	126	31,20	Efisien
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	654.000.000	589.124.400	90,08	15,89	18,84	119	28,92	Efisien
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1.690.506.400	1.559.642.780	92,26	100	100	100	7,74	Efisien
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	125.000.000	114.128.152	91,30	70,00	93	133	41,70	Efisien
		28.474.772.669	27.322.041.703	95,95			109,38	13,42	Efisien
<b>Rata-rata</b>								13,42	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang sepanjang Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata realisasi keuangan 95,95% dan rata-rata realisasi kinerja 109,38%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat indikator yang menunjukkan efisiensi sangat tinggi, hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya kolaborasi antar bidang di internal DPKP serta kolaborasi antar OPD. Adanya efisiensi anggaran diperoleh dari :

- a. Sisa tender;
- b. Dukungan capaian fisik dari APBN Dekonsentrasi dan TP;
- c. Dukungan Belanja Langsung APBD Provinsi;
- d. Pencapaian Produksi dari Swadaya Masyarakat.

## **BAB IV PENUTUP**

LKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang selama tahun 2024. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis RPJMD dan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2024. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang pada tahun 2024 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis RPJMD sebesar 112,42%. Dari 3 IKU seluruhnya berhasil melampaui target kinerja dengan faktor pendorong keberhasilan antara lain tingginya komitmen, banyaknya inovasi dan kolaborasi.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang pada tahun 2024 berhasil menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 sebesar Rp. 60.944.881.293,00 dengan efisiensi sebesar 2,68% atau senilai Rp. 1.680.200.592,00.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui tagline “*KUAT (Kreatif, Unggul, Akseleratif, Tangguh)*” pada dimensi Akuntabilitas Kinerja. Semoga akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang meningkat secara berkelanjutan.

Sumedang, 5 Januari 2024

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Sumedang,

  
**H. SAJIDIN S.Hut., M.T**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730330 199903 1 006